



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

**Perpolitikan Tanah dalam Pembangunan
Rezim Intervensionis**
S. Aminah

**Sistem Kekerabatan dan Pembangunan
Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia:
Analisis Kasus Keluarga Jawa**
Doddy S. Singgih

Reclaiming Tanah Perkebunan
Bagong Suyanto

Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan
Karnaji

**Resistensi Buruh Anak:
Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja
di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember,
Prop. Jawa Timur**
Sudarso

**Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Perspektif Teori dan Praktek**
Jusuf Irianto

Dampak Sosial Budaya dari Industri Pariwisata
M. Nurdin

**Resensi Buku:
Bersaksi untuk Pembaruan Agraria**
Helmy Prasetyo

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum
Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum
I. Basis Susilo

Penanggungjawab
Kris Nugroho

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)
Ramlan Surbakti (Unair)
Daniel Theodore Sparringa (Unair)
Mohtar Mas'ood (UGM)
Ashadi Siregar (UGM)
Herudjati Purwoko (Undip)
Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi
Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi
Harijono

Redaksi Pelaksana
Bagong Suyanto
Yuyun Wahyu Izzati
Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran
Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia
Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Pengantar Redaksi

Pada edisi nomor 4 (Oktober) 2003 ini jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* mengangkat topik utama tentang *Tanah dan Pembangunan*. Dari hasil seleksi artikel yang masuk ke redaksi, beberapa penulis memberikan analisis mengenai dampak politik pertanahan yang terjadi di Indonesia sampai bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap penguasa ketika tanah yang mereka upayakan diambil alih oleh mereka yang mengatasnamakan negara, di sisi lain perlawanan masyarakat menghendaki upaya redistribusi secara merata melalui *reclaiming* mulai marak terutama semenjak kejatuhan rejim Orde Baru. Artikel yang ditulis Siti Aminah misalnya, menjelaskan perpolitikan tanah dalam pembangunan rejim intervensionis. Kemudian artikel konseptual yang ditulis Doddy S. Singgih memberikan penjelasan tentang sistem kekerabatan dan pembangunan ekosistem pertanian pada kasus keluarga Jawa. Dengan nada yang sama upaya *reclaiming* tanah perkebunan ditulis oleh Bagong Suyanto. Dari hasil penelitian juga dihadirkan yaitu konflik tanah perkebunan di Malang Selatan dipaparkan oleh Karnaji secara gamblang, selain itu ringkasan tesis dari Sudarso tentang resistensi buruh anak terutama di perkebunan tembakau. Di samping topik pertanahan juga dihadirkan tema pengembangan sumber daya manusia oleh Jusuf Irianto, dampak sosial budaya dari industri pariwisata oleh M. Nurdin serta resensi buku dari Helmy Prasetyo tentang bersaksi untuk pembaruan agraria: dari tuntutan lokal hingga kecenderungan global.

Terlepas dari bentuk perlawanan yang dilakukan, tindakan petani berunjuk rasa atau merusak tanaman di lahan sengketa, sesungguhnya merupakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan dan rasa diperlakukan tidak adil oleh berbagai kebijakan yang berpola *top-down*. Penerapan UUPA yang dinilai bias dan hanya membela kepentingan pemilik modal dan negara, dipersepsi rakyat atau petani pada khususnya bukan hanya membuat terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur penguasaan, pemilikan dan penyewaan tanah, tetapi juga perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dan status sosial.

Akhirnya, semoga jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2004:
Dinamika Politik dan Pemilu di Indonesia

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Perpolitikan Tanah Dalam Pembangunan Rezim Intervensionis

S. Aminah

1

Sistem Kekerabatan dan Pembangunan Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia: Analisis Kasus Keluarga Jawa

Doddy S. Singgih

13

Reclaiming Tanah Perkebunan

Bagong Suyanto

23

Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan

Karnaji

29

Resistensi Buruh Anak: Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja Di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember, Prop. Jawa Timur

Sударso

52

Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Perspektif Teori dan Praktek

Jusuf Irianto

67

Dampak Sosial Budaya dari Industri Pariwisata

M. Nurdin

83

Resensi Buku

Bersaksi untuk Pembaruan Agraria:

Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global

Helmy Prasetyo Yuwinanto

91

CHILD LABOUR RESISTENCE

(A Case study Of Child Labour Working Realtion
in Tobacco Plantation Ajung—Jember, Prov. East Java)

RESISTENSI BURUH ANAK

Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja Di
Perkebunan Tembakau Ajung- Jember, Prop. Jawa Timur

Sudarso

Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair

Abstract

Generally, this research tries to identify and analize the causes, forms, and impacts of child labour working relations in tobacco plantation. Specifically, this research has some certain point of goals. The first, it explains in a great detail the working condition and exploitation of child labour in plantation sector. Secondly, it aims to know and analize the form of child labour resistance that is both hidden and manifest. Thirdly, it analyzes the impact of hidden and manifest child labour resistance in tobacco plantation.

Tobacco Plantation PTPN X, that is situated in Ajung-Jember, East Java, is purposively selected. This study interviewed 100 respondents in order to gain the form of child labour resistance. Fifteen respondents were selected for depth interview to get qualitative data. It yields that child labours are under marginalized condition that is doubled. The first one is the condition formed by structural pressure from their supervisor (mandor and mbok). Secondly, the subordinate and unequal relations between them and their senior labours. This resistance is caused by unfair treatment like wage cuttings, anger from their seniors quite frequent, and sexual harassment received from their mandor, mbok and senior labours. This kind of resistance is one of the safe solutions to maintain their work in the plantation. It is also supported by the fact that by doing this resistance, almost all of the child labour can avoid the negative impact. Although, they are expected to change the situation, the plantation management has not yet responded.

Keywords: *Child labour, Resistance, Marginalize.*

Di Indonesia akibat adanya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menyebabkan tingkat pendapatan penduduk menurun drastis—yang diikuti dengan terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Hal tersebut bukan saja menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sangat tajam yang ditunjukkan oleh meningkatnya penduduk miskin yang pada akhir tahun 1998 diperkirakan mencapai 49,5 juta jiwa atau bertambah sekitar 27 juta jika dibandingkan awal tahun 1996. Namun lebih dari itu dampak lanjutan yang kemudian timbul adalah semakin banyaknya jumlah pekerja anak, baik yang berusia 5-9 tahun atau 10-14 tahun. (BPS, 1999)

Selain terjadi penambahan jumlah absolut pekerja anak, dua akibat lain yang ditimbulkan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini adalah: Pertama, krisis menyebabkan anak-anak yang semula dominan sebagai pekerja keluarga, sebagian diantaranya terpaksa keluar dari keluarganya dan bekerja sebagai buruh. Untuk anak yang berusia 10-14 tahun pada periode Agustus 1997 sampai dengan Desember 1998 terjadi penambahan 4 persen yang bekerja sebagai buruh, sedangkan untuk pekerja anak usia 15-19 tahun terjadi penambahan 1% pada periode yang sama. Kedua, krisis juga menyebabkan terjadinya penambahan jam kerja bagi pekerja anak. Jika pada tahun 1998 pekerja anak laki-laki usia 10-14 tahun yang bekerja lebih dari 25 jam sekitar 26 persen, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi 27%. Untuk pekerja anak perempuan jika semula hanya 26 persen yang bekerja lebih dari 25 jam per minggu (1998), maka setelah krisis meningkat menjadi sekitar 27 persen.

Sementara itu, untuk pekerja anak laki-laki usia 15-19 tahun yang bekerja lebih dari 25 jam per minggu, jika pada 1998 ada sekitar 63 persen, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi 66 persen. Sedangkan pekerja anak perempuan di usia yang sama pada periode yang sama meningkat dari 58 persen menjadi 61 persen. (BPS, 1999)

Beberapa studi tentang pekerja anak yang dikaitkan dengan masa krisis tersebut, membuktikan bahwa pada masa krisis ekonomi acapkali muncul tindakan-tindakan yang merugikan anak., seperti kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Hasil kajian Irwanto (1999) , misalnya menemukan sekitar 71,9% pekerja anak bekerja selama lebih dari 7 jam sehari. Pekerja anak yang menjadi pembantu rumah tangga dan mereka yang bekerja di jermal bahkan bekerja lebih dari 12 jam sehari.

Penelitian lain yang membuktikan adanya keadaan eksploitatif anak pernah ditemukan oleh Mustai'in (2001), yang melakukan penelitian di Sampang, Probolinggo dan Bondowoso, dimana ada beberapa buruh anak yang bekerja selain jam kerjanya panjang sekitar 8-9 jam, juga berada di tempat yang sirkulasi udara tidak nyaman, serta menghirup bau yang menyengat yang berasal dari bahan baku dan beberapa zat kimia, misalnya tembakau dan rokok.

Beberapa contoh perlakuan diskriminasi dan keadaan marginal yang dialami oleh buruh anak di atas menunjukkan bahwa kondisi kerja dan kehidupan buruh anak sangat memprihatinkan. Dalam kenyataan sehari-

hari kondisi yang dialami para buruh anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dengan kondisi buruh dewasa, tetapi posisi buruh anak lebih lemah dari pada buruh dewasa, semata-mata hanya karena status sosial mereka sebagai anak-anak. Berhadapan dengan buruh dewasa seringkali mereka berada dalam posisi yang ter subordinasi, karena sebagian besar buruh dewasa menganggap anak-anak sebagai saingan. Pelbagai bentuk subordinasi terhadap buruh anak dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari menyuruh anak-anak melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya sampai dengan membentuk kelompok untuk menyingkirkan buruh anak. Berhadapan dengan pengusaha, posisi anak-anak juga lebih lemah dibandingkan dengan buruh dewasa. Sebagai buruh, meskipun sudah ada aturan ketenagakerjaan, hak-hak mereka tak terjamin, apalagi bagi buruh anak hak-hak tersebut lebih tidak terjamin lagi. Meskipun ada peraturan—undang-undang dan peraturan menteri—yang mengatur cara memperkerjakan buruh anak, tetapi jelas sekali tak ada maknanya. Buruh anak-anak dipekerjakan dalam kondisi yang sangat rawan. Dalam penelitian Yusnaini (2001:82), mengungkapkan bahwa konflik kerja terjadi karena eksploitasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh majikan atau pihak manajemen terhadap buruh anak.

Posisi buruh anak yang terjepit diantara dua kekuasaan—buruh dewasa dan pengusaha—tersebut harus memperjuangkan sendiri hak-haknya sebagai buruh. Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat mencoba melakukan pemberdayaan pada buruh anak, yang berupa pendidikan, pengetahuan tentang hak-hak buruh, dan peningkatan kualitas

hidup bagi buruh anak tersebut. Salah satu contoh LSM yang bergerak dalam pemberdayaan buruh anak di sektor perkebunan, yaitu Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM), mengungkapkan bahwa hasil pemberdayaan itu telah menghasilkan beberapa perubahan, misalnya, sudah munculnya keberanian beberapa buruh anak untuk mempertanyakan nasib dan posisi mereka selama ini, dan munculnya solidaritas diantara para buruh. (Mular, 1996:23-25).

Umumnya penelitian tentang pekerja anak (Irwanto, 1999; Musta'in, 2001; Suyanto, 2001) yang dilakukan sebelumnya, lebih banyak membahas soal eksploitasi, marginalisasi dan diskriminasi pekerja anak. Belum ada yang secara khusus mengkaji respon atau resistensi pekerja (buruh) anak dalam hubungan kerjanya. Oleh karena itulah studi tentang resistensi buruh anak di perkebunan menjadi amat penting untuk dikaji lebih dalam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena buruh anak yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa sangatlah tepat untuk mengamati keadaan posisi buruh anak dalam hubungan kerjanya yang cenderung telah mengalami perubahan tersebut, terutama persoalan munculnya keberanian buruh anak untuk mempertanyakan "posisi" dalam industri yang eksploitatif dan diskriminatif.

Untuk lebih memahami masalah buruh anak tersebut, maka dirumuskan masalah penelitiannya adalah: Mengapa buruh anak melakukan resistensi dalam

hubungan kerjanya di perkebunan tembakau ? termasuk di dalamnya: (a) Sebab-sebab munculnya resistensi; (b) Bentuk-bentuk resistensi; dan (c) Akibat-akibat yang ditimbulkan dari resistensi buruh anak tersebut.

Kerangka teori

Masalah konflik perkebunan bila menggunakan pemikiran Dahrendorf, yang pernah mengutarakan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat industri sejak abad ke sembilan belas. Perubahan-perubahan itu ialah: (1) dekomposisi modal, (2) dekomposisi tenaga kerja, dan (3) timbulnya kelas menengah baru. Selanjutnya Dahrendorf menjelaskan bahwa kelas-kelas sosial tidak lagi berdasarkan atas kepemilikan sarana-sarana produksi sebagaimana dinyatakan oleh Marx, tetapi ada dasar baru, yaitu mengacu pada hubungan-hubungan kekuasaan (*authority*) yang menyangkut bawahan dan atasan. Jadi perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih merujuk pada kekuasaan daripada kepemilikan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern kepemilikan sarana produksi tidak penting dengan yang melaksanakan pengendalian atas sarana tersebut. (Poloma, 1987:132-135)

Dari pemikiran diatas, nampaklah bahwa hubungan kerja di sektor perkebunan bisa dipahami dalam kerangka ada perbedaan kekuasaan (*authority*), dimana buruh—buruh anak— dalam posisi sebagai pihak yang tidak memegang kekuasaan berhadapan dengan pihak manajemen PTPN X yang punya kekuasaan mengatur dan mengelola segala aktivitas di perkebunan tembakau tersebut.

Dalam kerangka berfikir untuk melihat hubungan kerja di perkebunan, peneliti juga menggunakan analisis Weber mengenai proses rasionalisasi. Tindakan sosial menurut Weber, dapat dibagi dalam empat tipe orientasi: 1) rasionalitas instrumental (*Zwekrationalitat*), 2) Rasionalitas Nilai (*Wertrationalitat*), 3) Afeksi-afeksi atau emosi-emosi, dan 4). Tradisi. Kemudian pemikiran dari Weber tersebut dikembangkan oleh Kalberg (1980) ke dalam klasifikasi empat tipe rasionalitas, yaitu praktis, teoritis, substantif dan rasionalitas formal. (Susetian, 2000:33-38; Johnson, 1986:219-225).

Penelitian resistensi buruh anak lebih menekankan pada tipe rasionalitas praktis, formal dan substantif. Penekanan penggunaan tipe rasionalitas ini dikarenakan dalam persoalan resistensi buruh anak saling terkait antara kepentingan buruh, perusahaan dan juga nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Buruh Anak dan marginalisasi

Teori transisi industrialisasi dari Rogers dan Standing (Giddens, Held, 1987:289-290).. Teori ini menjelaskan bahwa pada tahap awal industrialisasi dibutuhkan pemupukan modal untuk meningkatkan produksi atau teknologi. Untuk menekan biaya produksi, wanita atau anak-anak akan dipekerjakan, sebab hal ini akan menekan upah. Dikebanyakan negara-negara sedang berkembang, secara cultural wanita dan anak-anak dipandang bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Mereka hanyalah membantu mencari nafkah

kepala keluarga. Atas dasar pandangan inilah banyak pemilik modal memperkerjakan wanita dan anak-anak sebagai butuh di industrialisasi dengan upah rendah.

Menurut hasil penelitian Indrasari Tjandraningsih dan Benyamin White (Prisma, 1992), dalam era industrialisasi yang berlangsung di Indonesia saat ini, yang berubah bukanlah keterlibatan anak-anak itu dalam angkatan kerja, tetapi yang terjadi adalah perubahan bentuk dan sifat keterlibatan mereka. Bila di era sebelumnya anak-anak banyak terlibat di sektor pertanian yang tidak dibayar karena cuma sebatas membantu pekerjaan orang tua, maka pada era industrialisasi keterlibatan anak-anak tersebut telah bergeser ke sektor industri—termasuk agroindustri—, perdagangan, dan jasa sebagai tenaga kerja upahan.

Penundukan buruh anak melalui hubungan kerja ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan dan wewenang dalam sistem produksi kapitalis. Menurut Dahrendorf (1986:201) dalam setiap organisasi sosial sejumlah posisi tertentu berdasarkan peraturan hukum dipercayakan untuk mengendalikan posisi yang lain untuk menjamin penggunaan kekuasaan yang efektif. Asumsi bahwa perbedaan pembagian kekuasaan dan wewenang senantiasa menjadi faktor yang menentukan dari sejenis pertentangan sosial sistematis yang berhubungan erat dengan pertentangan kelas menurut pengertian tradisional (Marxian).

Resistensi Buruh

Para sosiolog industri secara umum sepakat bahwa konflik-konflik industrial memiliki manifestasi yang bervariasi.

Konflik-konflik seperti misalnya: pemogokan, sabotase, restriksi out-put, non-kooperasi, dan lainnya dapat terjadi dalam basis individual maupun kolektif. Semua hal tersebut adalah konflik-konflik yang terbuka dalam hubungan industrial. Disisi lainnya ada konflik "terselubung" atau "tersembunyi" dan dikenal sebagai "konflik laten". Konflik laten biasanya muncul dimana terdapat kontrol organisasional kuat yang berusaha mendominasi atau mensubordinasi para buruh. Dalam kasus disfungsi organisasi-organisasi pekerja ditingkat pabrik serta kegagalan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan para buruh, konflik-konflik antara majikan dan para buruh memiliki tendensi untuk lebih terselubung daripada terbuka. (Susetawan, 2000:216-217)

Dahrendorf, mengungkapkan bahwa pada setiap asosiasi atau dalam konteks ini perusahaan akan selalu ditandai oleh pertentangan antara yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur tersebut. Kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah (buruh) melahirkan ancaman bagi ideologi penguasa serta hubungan sosial yang terkandung didalamnya. Kepentingan yang dimaksud Dahrendorf, bisa bersifat manifes (disadari) dan kepentingan potensial (laten). Kepentingan laten lebih merujuk pada tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Jadi kepentingan-kepentingan yang tidak disadari atau laten bisa muncul kepermukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari, seperti

persamaan gaji, persamaan kesempatan kerja. Dari sinilah kemudian akan muncul kelompok-kelompok manifest yang sadar akan hak dan kewajibannya. Akhirnya Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik itu akan selalu ada, karena ada perbedaan kekuasaan, dan usaha yang mencoba untuk menekan atau menghapuskan pertentangan tersebut adalah sia-sia. (Poloma, 1987: 136-139)

Menurut Coser (Johnson, 1986:201) ada dua konsekuensi dipendamnya konflik atau kepentingan yang berlawanan, **pertama**, dipendamnya konflik dapat mengakibatkan putus hubungan. Kalau keterlibatan emosional para anggotanya sudah tinggi, berakhirnya hubungan itu mungkin dipercepat dengan meledaknya konflik secara tiba-tiba dan parah, dimana ketegangan dan permusuhan yang menggunung sejak lama meledak dalam bentuk amukan yang keras. Konsekuensi **kedua** yang mungkin terjadi karena dipendamnya konflik adalah mengelakkan perasaan bermusuhan itu dari sumber yang sebenarnya, dan mengembangkan suatu saluran alternatif untuk mengungkapkannya. Alternatif seperti itu adalah sejenis katup pengaman dengan mana dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusakkan solidaritas.

Ada dua hal yang penting dilihat dari kehidupan buruh yaitu *survival* dan gerakan. *Survivalitas* adalah bagaimana mereka dapat bertahan hidup, sedangkan gerakan reaksi buruh adalah dari ketidakmampuan mereka dalam menghadapi realitas ekonomi. Dalam melihat gerakan sosial, terdapat dua bentuk yaitu pertama pola struktural dan kedua pola non struktural. Dalam pola

struktural, resistensi yang dilakukan adalah terhadap pengusaha atau penguasa. Secara struktural, ada kelompok lain yang sifatnya menindas. Dalam hal ini, terdapat perbedaan kelas yang tajam seperti kelas buruh dengan pengusaha maupun budak dengan majikan. (Zubir, 2002:36)

Dalam gerakan sosial, resistensi yang dilakukan beragam coraknya. Rajendra Singh menyebutkan bahwa gerakan sosial merupakan tindakan yang mendayu-dayu (*autopoietic*) yang diterapkan masyarakat pada dirinya sendiri untuk survival dan berkelanjutan. Namun dalam prakteknya, gerakan seperti ini berjalan dalam waktu yang panjang dan tidak membuahkan hasil dalam jangka pendek. Dalam mengkaji kelompok bawah (pinggiran) yang melahirkan gerakan sosial terdapat dua pola yaitu gerakan sosial yang berbentuk struktural dan gerakan sosial yang berbentuk non struktural. Dalam ungkapan lain, Singh menyebutkan bahwa gerakan sosial ada bentuk gerakan sosial lama dan baru. Gerakan sosial yang lama bersifat menekankan unsur perbedaan kelas seperti petani buruh, sedangkan gerakan sosial baru yang menekankan pada resistensi tanpa kelas seperti gerakan mahasiswa, gerakan lingkungan, dan lain-lainnya. (Zubir, 2002:38-39)

Robert Gurr (2002:40) pernah mengungkapkan bahwa dasar gerakan sosial adalah *the basic frustration*, berarti gerakan sosial dimulai oleh rasa frustrasi atas keadaan yang menimpa diri seseorang atau sekelompok orang. Rasa frustrasi yang dimiliki oleh seseorang pada walnya tidak menimbulkan reaksi apapun. Misalnya saja perwujudan dari sikap frustrasi, awalnya hanya diam saja atas

berbagai persoalan yang ada di sekitarnya. Sikap diam seperti itu sudah merupakan bentuk yang paling dasar dari protes sosial dalam masyarakat. Seorang anak misalnya, ketika disuruh oleh orang tuanya, ia tidak mau atau diam saja. Sikap ini sudah merupakan pembangkangan paling awal terhadap kondisi yang ada dan sudah merupakan bentuk yang paling dasar dari gerakan sosial.

Sementara itu Scott (2000:382), mengatakan bahwa resistensi kelas itu memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat kelas atas berhadapan dengan kaum yang kalah. Resistensi berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas; berlaku baik sebagai tindakan resistensi perorangan maupun resistensi kolektif, juga bentuk-bentuk resistensi ideologi yang menantang definisi situasi yang dominan dan menuntut berbagai standar keadilan dan kewajiban. Jadi resistensi berfokus pada maksud ketimbang pada konsekuensi, sehingga diakui bahwa banyak aksi resistensi mungkin gagal mencapai hasil yang dimaksud.

Ada sepasang bentuk resistensi, yaitu: Pertama, resistensi setiap hari, yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus antara kaum tani dan orang-orang yang berupaya untuk menarik tenaga kerja, makanan, pajak, dan keuntungan dari mereka. Umumnya bentuk resistensi ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Kedua, pembangkangan langsung/terbuka. (Scott, 2000:40-43)

Kedua bentuk resistensi ini sebenarnya sama-sama bertujuan untuk memperkecil atau menolak sama sekali

klaim-klaim yang diajukan oleh kelas yang dominan atau mengajukan klaim-klaim dalam menghadapi kelas-kelas yang lebih dominan. Klaim-klaim biasanya berhubungan dengan segi material dari pertarungan antar kelas—pemilikan tanah, tenaga kerja, pajak, dan lainnya. Perbedaan resistensi setiap hari yang paling mencolok apabila dibandingkan dengan oresistensi lainnya adalah hal penolakan yang implisit terhadap tujuan-tujuan publik dan simbolik. Apabila dunia perpolitikan yang terlembaga itu bersifat formal, terbuka, dan berkenaan dengan perubahan yang sistematis yang bersifat *de jure*, maka resistensi sehari-hari itu adalah informal, sering tidak terbuka, dan pada umumnya hanya berkenaan dengan hasil-hasil langsung yang bersifat *de facto*. (Susetian, 2000)

Dari penjelasan Scott di atas, bisa dikatakan bahwa keberhasilan resistensi *de facto* itu acapkali berkorelasi langsung dengan kepatuhan simbolis yang menjadi samarannya. Memberikan perlawanan secara terbuka dalam hampir semua keadaan akan memancing suatu respon yang lebih cepat dan lebih kejam ketimbang suatu ketidakpatuhan yang mungkin tidak demikian meluas, akan tetapi tidak pernah membantah definisi formal hierarki dan kekuasaan. Bagi kebanyakan kelas bawah, yang sudah pasti dalam sejarah nyatanya sedikit sekali prospeknya untuk memperbaiki status mereka, maka bentuk resistensi *de facto* inilah pilihan satu-satunya.

Selanjutnya Scott (2000), mengemukakan adanya perbedaan perspektif antara resistensi sungguh-sungguh di satu pihak dengan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental dan aksi kecil-kecilan (terselubung) di pihak lain.

Resistensi yang sesungguhnya bersifat: (a) terorganisasi, sistematis dan kooperatif; (b) berprinsip atau tanpa pamrih; (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner; (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sedangkan yang bersifat kegiatan kecil-kecilan (terselubung), *insidental* dan, gejala kejahatan sekunder adalah: (a) Tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual; (b) bersifat untung-untungan dan berpamrih; (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner; (d) dalam maksud dan logikanya mengandung anti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada.

Meminjam istilah yang dipakai oleh Scott, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk resistensi sehari-hari dari kalangan buruh anak dalam bentuk resistensi terselubung muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk tekanan sehari-hari yang dilakukan oleh pihak manajemen/pengusaha perkebunan. Tidak terjadinya resistensi terbuka bagi kaum yang lemah, miskin, atau dalam konteks ini adalah buruh anak, menurut Scott (2000), karena adanya faktor-faktor penghalang munculnya resistensi terbuka, yaitu: Pertama, Struktur Sosial yang tidak kondusif. Seperti yang pernah diungkapkan dalam hasil penelitiannya di Sedaka, bahwa konflik terbuka tidak muncul, karena transformasi dalam lahan pertaniannya telah menghapus peranan kaum miskin dari proses produksi, sehingga kaum miskin semakin tersisih dan semakin sedikit pilihan dalam hubungan kerja dengan pemilik lahan. Jika keadaan ini dianalogikan dalam kehidupan buruh anak di perkebunan tembakau, nampak jelas bahwa berubahnya lahan pertanian, seperti semakin menyempitnya lahan,

menyebabkan anak tidak tertampung lagi dalam struktur pertanian tradisional, sehingga mereka masuk dalam pekerjaan alternatif lain yang hampir merupakan salah satu yang mungkin dilakukan untuk membantu ekonomi keluarga, yaitu di agroindustri tembakau tersebut. Karena pilihan yang tinggal satu-satunya tersebut, buruh anak semakin mudah tereksplorasi dan semakin tidak berdaya menghadapi hubungan kerjanya dengan penguasa perkebunan. Penghalang Kedua, adalah kebutuhan *survival*. Pekerjaan yang ditekuni buruh anak tersebut harus dijalani bukan semata-mat untuk keperluan jajan mereka atau mengisi waktu luangnya, tetapi ada kebutuhan yang penting, yaitu dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya yang umumnya tergolong keluarga miskin. Jadi tidak ada jalan lain, kecuali mencari cara penyesuaian dengan lingkungan kerja, supaya biasa terus bertahan di perkebunan.

Jadi resistensi terselubung yang dilakukan buruh anak merupakan alternatif yang paling aman atau kalau meminjam istilah dari Scott (1988), tindakan buruh anak ini adalah sebagai tindakan "dahulukan selamat" dan rasional supaya mereka tetap bisa bekerja sambil mengeluarkan ketidakpuasan pada pihak perusahaan perkebunan.

Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian resistensi buruh anak ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai resistensi yang dilakukan buruh anak terutama disektor perkebunan tembakau. Penelitian buruh anak ini memilih daerah perkebunan tembakau

PTPN X Ajung yang terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan alasan bahwa Kabupaten Jember—salah satunya PTPN X Ajung—merupakan daerah yang sebagian besar lahannya diperuntukkan untuk kegiatan di sektor perkebunan, dan perkebunan yang menjadi tonggak perekonomian kabupaten ini adalah perkebunan tembakau.

Dalam penelitian yang menjadi populasinya adalah buruh anak yang bekerja di perkebunan tembakau, yaitu buruh anak yang bekerja di perkebunan PTPN X Kebun Ajung. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 buruh anak.

Data yang diperoleh dalam penelitian buruh anak perkebunan ini berasal dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan buruh anak dengan memakai kuesioner dan pedoman wawancara untuk *in depth interview* (wawancara mendalam).. Dalam penelitian ini ada 15 buruh anak yang diwawancarai secara mendalam.

Sementara data sekunder diperoleh dari pihak Perkebunan PTPN X, Laporan Penelitian, jurnal, artikel, Biro Pusat Statistik (BPS) dan buletin yang diterbitkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu YPSM (Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat) yang berkecimpung dalam penanganan buruh anak di sektor perkebunan tembakau.

Pengumpulan data yang dilakukan, terutama data primer—wawancara—berkaitan dengan pengalaman resistensi yang dilakukan buruh anak, dibatasi pada masa setelah tahun 1997, yaitu pada masa yang lebih dikenal dengan masa reformasi. Pembatasan ini dilakukan untuk lebih bisa mendapat gambaran yang lebih dalam tentang proses resistensi, terutama

mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan secara terbuka.

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan, yaitu: Pertama, data yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan kuesioner, akan mendapatkan data yang lebih merupakan gambaran umum tentang resistensi. Dalam tahap ini lebih banyak menganalisis data-data kuantitatif, dalam bentuk interpretasi data dari tabel frekuensi, untuk mengetahui penyebaran data dan tabel silang yang melihat kecenderungan hubungan dan perbandingan antar dua variabel. Kedua, Dari gambaran umum tersebut kemudian dilakukan pemilahan atau klasifikasi, dan diperoleh klasifikasi seperti kasus-kasus resistensi terbuka dan terselubung. Tahap kedua ini lebih banyak menganalisis data-data kualitatif.

Temuan dan Analisis

Di perkebunan tembakau, keterlibatan anak-anak pedesaan dalam pekerjaan sektor pertanian tersebut, ternyata sudah berlangsung mulai jaman kolonial Belanda. Keterlibatan anak sejak jaman kolonial sampai sekarang memang tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi selalu menjadi alasan utama yang menyebabkan anak-anak tersebut menjadi buruh dalam usianya yang masih muda dan melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa.

Di lingkungan keluarga miskin sudah menjadi hal yang lazim, kalau anak juga menjadi tumpuan dan sumber penghasilan, yang sangat penting. Bahkan, melibatkan anak dalam kegiatan produktif dalam banyak hal dipandang sebagai salah satu mekanisme survival untuk

mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak dapat terpenuhi dari hasil kerja orangtua. Namun demikian, diluar faktor ekonomi sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan atau melatarbelakangi anak terpaksa putus sekolah dan kemudian bekerja.

Selain tekanan kemiskinan, sebetulnya masih ada faktor lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau terpaksa terlibat dalam kegiatan di perkebunan., yaitu faktor kultural atau tradisi masyarakat madura yang "mewajibkan" anak-anak sejak dini terbiasa bekerja sebagai bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri.

Beberapa temuan pokok hasil penelitian yang menfokuskan pada resistensi buruh anak perkebunan tembakau adalah:

Pertama, posisi buruh anak diperkebunan lebih banyak menjadi obyek dari sistem yang tercipta dalam sektor yang selalu menghasilkan devisa bagi negara tersebut. Buruh anak bukan hanya mengalami tekanan "struktural" dari mandor yang menjadi pengawas para buruh tersebut, tetapi juga dari mandor "bayangan" yang disebut *mbok (lokal)* ikut memperlancar tekanan struktural yang dialami buruh anak. Disisi lain dalam kelompok buruh perkebunan, buruh anak tetap dalam posisi yang kalah dibandingkan buruh dewasa, yang senantiasa menganggap bahwa buruh anak hanya sebagai pelengkap dalam pekerjaan di sektor perkebunan tersebut. Ketidak berdayaan buruh anak tersebut dapat ditunjukkan mulai dari perlakuan para mandor dan *mbok* yang mencerca dan memarahi anak-anak dengan kata-kata yang kotor, pemotongan upah, pemaksaan target perusahaan bahkan ada beberapa

kasus melakukan pelecehan seksual, baik melalui perkataan maupun sentuhan fisik pada buruh anak perempuan. Perlakuan tersebut juga dilakukan oleh buruh dewasa, terutama buruh dewasa yang berjenis kelamin laki-laki. Perlakuan dari mandor, *mbok* dan buruh senior tersebut memposisikan buruh anak dalam keadaan marginalisasi ganda.

Kedua, bentuk resistensi sehari-hari buruh anak yang peneliti temukan di perkebunan tembakau, cenderung menggunakan resistensi terselubung. Pola diam, tetapi melawan secara sembunyi dan mengomel menjadi pilihan yang sering menjadi rutinitas resistensi. Pola dari resistensi yang dilakukan buruh anak lebih merujuk pada posisi dari pihak yang menjadi lawannya, dalam konteks penelitian ini yang menjadi pihak lawan adalah mandor, *mbok* dan buruh senior.

Pada saat menghadapi mandor yang dalam struktur merupakan atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk memberhentikan buruh, tindakan yang dilakukan cenderung menggunakan pola diam, tetapi kemudian melakukan resistensi terselubung untuk kasus yang bisa mempengaruhi pendapatan buruh anak, seperti masalah target perusahaan, lembur dan pemotongan upah. Tetapi apabila masalahnya tidak berkait atau mempengaruhi pendapatan buruh, maka cara yang dilakukan adalah dengan mengomel. Keadaan ini berkebalikan dengan pola yang dilakukan jika menghadapi *mbok*, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan buruh anak ketika bermasalah dengan *mbok* baik berkaitan dengan pekerjaan ataupun tidak, tindakan yang dilakukan cenderung mengomel, daripada diam, tetapi melawan. Sedangkan tindakan yang dilakukan buruh senior

cenderung berimbang penggunaan antara tindakan mengomel dengan diam tetapi melawan.

Satu-satunya yang sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaan di perkebunan tembakau, tetapi cukup sering dialami buruh anak, terutama buruh anak perempuan adalah pelecehan seksual. Resistensi yang dilakukan buruh anak menghadapi pelecehan seksual ini cenderung menggunakan cara mengomel, yaitu dilakukan pada mandor dan mbok. Resistensi dengan mengomel ini tergolong "berani" dan terpaksa dilakukan karena buruh anak merasa harga dirinya sudah terusik.

Ketiga, Resistensi antara buruh anak perempuan dan laki-laki kecenderungan menunjukkan bahwa buruh anak laki-laki lebih berani dengan pola yang "terbuka" dalam melakukan resistensi dibanding dengan buruh perempuan. Namun terbukanyapun lebih pada ungkapan yang berupa kata-kata, seperti mengomel. Keadaan ini bisa dikaitkan dengan latar belakang lingkungan buruh anak yang berasal dari kalangan masyarakat madura, dimana dalam lingkungan madura yang menganut patriarki, selalu disosialisasikan pada anak-anaknya bahwa penjaga kehormatan keluarga adalah laki-laki (suami/bapak), oleh karena itu sejak anak-anak, laki-laki dibentuk untuk lebih berani dibandingkan perempuan.

Keempat, munculnya resistensi yang dilakukan buruh anak sebagian besar merupakan hasil dari inisiatifnya sendiri. Keadaan ini terjadi karena buruh anak merasa diperlakukan yang tidak menyenangkan dalam hubungan kerjanya di perkebunan. Perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut acap kali berupa

kemarahan, ucapan dan perilaku yang menyinggung perasaan buruh anak yang sebegini besar buruh perempuan tersebut. Keadaan ini juga didukung semakin melemahnya peran struktur penengah dalam masyarakat, karena pihak perkebunan semakin rasional dan ekonomis dalam hubungan kerjanya.

Kelima, akibat yang diterima buruh anak, karena melakukan resistensi yang cenderung terselubung tersebut umumnya ditanggapi biasa saja oleh pihak yang pernah berkonflik dengan buruh anak, terutama mandor. Pilihan pada resistensi yang lebih banyak pada pola terselubung, bukannya datang secara kebetulan, tetapi merupakan pilihan yang rasional dan tepat, karena buruh anak tersebut ternyata secara langsung maupun tidak langsung sadar bahwa posisinya dalam hubungan kerja di perkebunan tembakau tersebut selalu menjadi pihak yang kalah dan bawah. Ditambah lagi kondisi lingkungan, terutama kesempatan kerja di pedesaan yang bisa dikerjakan anak dalam rangka membantu orang tuanya mencari penghasilan itu semakin sedikit, karena lahan sedikit dan saingan tenaga kerja semakin banyak. Jadi mau tidak mau pekerjaan yang diraih sekrang, yaitu sebagai pekerja perkebunan harus dipertahankan agar tidak *dilorot* (PHK).

Kesimpulan

Diperkenalkannya model perkebunan tembakau pada masa penjajahan kolonial Belanda, jelas telah membawa dampak perubahan pada pengelolaan sektor pertanian yang semula dengan cara tradisional, beralih menjadi lebih modern yang lebih memperhitungkan pada rasionalitas dan keuntungan. Seperti

pernah dikemukakan oleh Scott (1988), bahwa adanya komersialisasi pertanian akan membawa pengaruh pada memburuknya "perimbangan pertukaran" (*balance of exchange*) antara pemilik dan penyewa/buruh, dan menimbulkan tata hubungan yang semula *patron-client* menjadi hubungan yang eksploitatif.

Temuan Scott tersebut, apabila dipergunakan dalam menganalisa munculnya perkebunan tembakau mulai masa kolonial Belanda sampai sekarang—yang sudah dikuasai negara—, nampak bahwa hubungan-hubungan dalam agroindustri tembakau, yaitu antara pengelola dan buruh masih berupa hubungan yang selalu tidak seimbang, dimana penguasa—pengelola perkebunan— selalu berada pada posisi yang selalu di atas.

Beberapa bukti yang bisa dikemukakan dari hasil analisis penelitian ini, bahwa dalam struktur organisasi perkebunan tembakau masih cenderung seperti model patriarki, karena mayoritas masih di kuasai laki-laki — mulai dari mandor sampai administrasi— sedangkan buruh yang jumlahnya mayoritas dan sebagian besar perempuan, berada dalam posisi dikuasai, meskipun kalau dilihat dari sisi jumlahnya lebih banyak.

Keadaan ini membuktikan bahwa tidak selamanya bahwa kapitalisme—komersialisasi perkebunan— yang diperkenalkan Belanda untuk mengusung perubahan menuju masyarakat yang lebih modern. ternyata cenderung ikut hanyut dalam budaya tradisional seperti patriarki tersebut. Menurut Hartman (Gidden, Held, 1987), ada interaksi antara patriarki dan kapitalisme. Patriarki yang lebih dulu ada, sukar ditaklukkan oleh kapitalisme, malah masih cenderung kuat. Patriarki

menciptakan bentuk kapitalisme modern, sebagaimana perkembangan kapitalisme telah menyebarkan institusi-institusi patriarki. Akomodasi bersama antara sistem patriarki dan kapitalisme menciptakan lingkaran setan bagi perempuan.

Lebih menarik lagi penelitian buruh anak perkebunan tembakau ini juga membuktikan bahwa model tradisional, kolonial dan jaman kapitalis berkuasa, ternyata posisi buruh anak tidak mengalami perubahan yang signifikan, malahan dalam kasus-kasus tertentu lebih eksploitatif, artinya pekerja anak mulai jaman masyarakat yang masih tradisional sampai jaman agroindustri yang ditawarkan oleh Belanda tersebut dalam posisi yang mengalami tekanan struktural dari pihak yang menguasai perkebunan— yang dalam konteks penelitian ini ditunjukkan oleh perlakuan mandor—dan juga selalu menjadi korban dalam hubungannya dengan buruh yang lebih dewasa. Jadi buruh anak perkebunan tembakau merupakan gambaran yang sebenarnya dari keadaan marginal ganda (*double marginal*).

Salah satu penjelasan dari pendekatan struktural konflik, menunjukkan bahwa analisis awal tentang konflik yang bisa menerangkan terjadi perbedaan kekuasaan yang didalamnya ada juga kepentingan yang berbeda yang menyebabkan buruh anak dengan pengelola—terutama mandor—selalu terlibat konflik, tetapi penjelasan lebih lanjut tentang resistensi yang cenderung terjadinya resistensi terbuka dalam konflik, tidak pas untuk melihat fenomena resistensi buruh anak yang cenderung melakukan perlawanan yang tersebut dan tidak hendak menjatuhkan pihak

pengelola—mandor—perkebunan tembakau.

Dalam sisi fenomena resistensi yang terselubung inilah pendekatan fenomenologi mampu mengisi analisis yang lebih obyektif dibandingkan dengan struktural konflik yang masih makro, karena fenomenologi lebih memahami dan mendalam persoalan pengalaman sehari-hari tentang kesadaran, ide dan tindakan yang dilakukannya pada waktu melakukan hubungan kerjanya dengan mandor, *mbok* dan buruh senior di perkebunan

Penelitian resistensi buruh anak ini mengingatkan pada semua orang bahwa dalam memahami aksi resistensi kelompok atau masyarakat kelas bawah—termasuk buruh anak—dibutuhkan suatu proses dialektika—yang mencoba memadukan dan menjembatani kekakuan struktur dan otoritas individu dalam bertindak agar saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menciptakan zone-zone sosial bagi kelompok atau masyarakat kelas bawah. Seperti yang pernah dijelaskan dalam studi ini, bahwa resistensi yang dilakukan buruh anak dalam menghadapi kuatnya hegemoni perkebunan tembakau, yang berideologikan nilai-nilai feodalistik dan kapitalistik tersebut, ternyata tetap

memiliki kekenyalan strategi atau cara yang dilakukan dengan konsep ideologinya sendiri, dan terus dipertahankan serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari di perkebunan tembakau.

Resistensi-resistensi yang dilakukan buruh anak dalam hubungan kerjanya di perkebunan tembakau, menunjukkan bahwa dibalik keadaan yang tidak berdaya dan tereksplorasi, ternyata muncul ide dan model resistensi yang terselubung dalam ngomel dan diam. Pernyataan ini juga memperkuat sinyalemen Scott (2000) yang mengungkapkan bahwa kaum lemah selalu mempunyai "senjata" menghadapi pihak yang mempunyai kekuasaan.

Akhirnya, penelitian yang lebih cenderung menggambarkan proses resistensi yang dilakukan buruh anak perkebunan ini, mempertegas dan membuka alternatif pemikiran baru beberapa kajian buruh anak yang pernah dilakukan, bahwa buruh anak dalam menghadapi situasi hubungan kerjanya yang cenderung diskriminatif dan eksploitatif tersebut, ternyata ada benih-benih resistensi yang muncul untuk memberikan respon pada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima setiap harinya, meskipun resistensinya masih dilakukan secara tersembunyi atau terselubung.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986).
- Effendi, Tadjuddin Noer, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).
- Giddens, Anthony dan Held, David, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).
- Haryadi, Dedi dan Tjandraningsih, Indrasari, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996).
- Irwanto dan Tim, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya dan Medan*, (Jakarta: Kerjasama Unika Atmajaya dan UNICEF, 1995).
- Irwanto, Farid, Muhammad dan Anwar, Jeffry, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, (Jakarta: Kerjasama Unika Atmajaya, Departemen Sosial dan UNICEF, 1999).
- Jary, David dan Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (New York: HarperCollins Publisher, 1991).
- Jhonson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, Jilid I, (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Korten, Davis C. dan Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI), 1988).
- Lansberger, Henry A dan Alexandrov, YU.G., *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Latif, yudi, dan Subandi, Indi (eds.), *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Mulandar, Surya (ed.), *Anak Marjinal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, (Bandung: Akatiga Gugus Analisis, 2001).
- Musta'in dan Tim, *Studi Kualitatif tentang Pekerja Anak di Jawa Timur*, (Surabaya: Kerjasama Pusat Studi Ketenagakerjaan Unair, Bappeda Tk. I Jatim dan UNICEF, 2001).
- _____, *Eksplotasi dan Bahaya Mengancam Pekerja Anak, Studi Kualitatif tentang Pekerja Anak di Sektor Berbahaya di Jawa Timur*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 1991).
- Olson Jr, Mancur, *The Logic of Collective Action*, (New York: Schocken Books, 1969).
- Saptari, Ratna, dan Holsner, Brigitte, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- _____, *Resistensi Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).

- _____, *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah, Bentuk-Bentuk Resistensi Seharian-hari Kaum Petani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Suyanto, Bagong, *Pelacuran Anak Wanita di Kota Surabaya, Studi Kasus di Kompleks Dolly dan Jarak*, (Surabaya: Kerjasama Fisip Unair, Yayasan Kusuma Buana, Lembaga Penelitian Unika Atmajaya, dan ILO/IPEC, 1997).
- _____, *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur*. (Surabaya: Kerjasama FISIP Unair, Bappeda Tk. I Jatim Dan UNICEF, 1999).
- _____, dan Hariadi, Sri Sanituti (ed), *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000).
- Susetiawan, *Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Sanderson, Stephen K., *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).
- Tjandraningsih, Indrasari, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pedampingan Pekerja Anak*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1995).
- _____, dan Anarita, Popon, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Jember dan Deli Serdang*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2001).
- UNICEF, *Invisible Children, Child Work In Asia and Pasific*, (Bangkok: Child Workers Asia and Saves The Children, 1997).
- Zubir, Zaiyardam, *Radikalisme Kaum Pinggiran*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002)

Hasil Penelitian/Tesis/Disertasi:

- Yusnaini, Posisi Buruh Anak di sektor Industri, Studi Pola Hubungan Kerja antara Buruh Anak dan Majikan pada Pabrik Garmen PT. RS di Kodya Surakarta, *Tesis*, 2001
- Siahaan, Hotman M., Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program TRI, sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi, *Disertasi*, 1996
- Suyanto, Bagong, Pemberdayaan dan Resistensi Diskursif Masyarakat Miskin, *Tesis*, 1999

Dokumen, Majalah dan Koran:

- BPS, Sakernas, 1999
- BPS, Indikator Kesejahteraan Anak, 1999
- Kompas, 2 Juni 2000
- Progressia, Edisi IV Juli, 2000
- Prisma, No. 1, 1992
- Kumpulan Makalah Konferensi Nasional II Masalah Pekerja anak di Indonesia, Bogor 24-26 Juli 1996, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), DEPNAKER RI dan ILO/IPEC